

**KAJIAN KERENTANAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT
TERHADAP BENCANA KEBAKARAN
DI KECAMATAN TAMBORA - JAKARTA BARAT**

Tugas Akhir

Oleh:

Dimas Andhi Ismawan
L2D 002 395



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008**

ABSTRAK

Urbanward Migration tidak pernah luput menghinggapi kota-kota besar di negara manapun. Tak terkecuali di Jakarta, kota yang tumbuh di bawah impotensi pemerintah dan negara dalam mengatasi permasalahan tata ruang. Hasilnya adalah munculnya permukiman padat yang seiring dengan perjalanan waktu menimbulkan permasalahan bagi warganya sendiri.

Permukiman padat terutama di Jakarta tidak pernah luput dari permasalahan fisik kawasan berupa banjir dan kebakaran. Apabila keduanya dibandingkan dalam lingkup permukiman padat maka kebakaran lah yang paling berpotensi menjadi bencana. Urgensi bencana terletak pada ancaman jatuhnya korban pada manusia dan kerugian materi dalam jumlah besar. Ada hal menarik ketika sebuah wilayah kecamatan yang bernama Kecamatan Tambora dijumpai fakta bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan terpadat se-Indonesia, salah satu kelurahannya adalah hunian horizontal terpadat se-Asia, setiap tahun menerjunkan kendaraan pemadam kebakaran paling banyak di Jakarta, selalu menempati dua-besar pada dampak kehilangan tempat tinggal, dan korban hilang nyawa terbanyak. Bahaya tersebut setiap saat menjadi ancaman serius bagi warga disana. Maka timbul pertanyaan akan bagaimana kerentanan fisik ruang kawasan yang terjadi pada kawasan permukiman tersebut.

Oleh karena itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerentanan kawasan permukiman padat terhadap bencana kebakaran di Kecamatan Tambora dengan menganalisis jangkauan pelayanan prasarana pemadam kebakaran, menganalisis lokasi kerentanan fisik ruang kawasan terhadap bencana kebakaran, Menganalisis lokasi pemicu kebakaran, serta menganalisis jangkauan pelayanan teknis pemadaman.

Analisis tersebut dijanlankan dengan metode kuantitaif menggunakan data sekunder berupa peta yang memuat data kavling bangunan beserta fungsi bangunannya dan jenis bangunannya, serta inventaris perlengkapan pemadam kabakaran yang tersedia di tiga unit pemadam kebakaran di Kecamatan Tambora. Program Arcview 3.1 dijadikan alat bantu untuk melakukan analisis tersebut.

Sebagai hasil analisis ditemukan bahwa pertama hanya 50% ruas jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan pemadam dengan lebar badan 3meter. Kedua, terdapat kesesuaian antara data statistik dengan fakta analisis bahwa Kelurahan Duri Selatan, Duri Utara, Krendang, Pekojan, dan Tambora adalah kelurahan yang paling sering terjadi kebakaran dan tetap beresiko terjadi bencana kebakaran apabila muncul kebakaran pada sebuah bangunan. Ketiga, Kelurahan Kalianyar merupakan lokasi yang paling berpotensi muncul pemicu kebakaran. Keempat, 8,5% luas wilayah kecamatan tambora belum terlayani oleh jangkauan teknis pemadam kebakaran dengan peralatan yang dimiliki saat ini.

Dengan hasil demikian maka peneliti merekomendasi untuk menambahkan fasilitas di setiap unit pemadam kebakaran berupa kendaraan pemadam SUV dan pompa air portable, penyuluhan bahaya kebakaran secara berkelanjutan, membangun tandon air di lokasi-lokasi Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Krendang, Tambora serta Pekojan, dan terakhir adalah pembangunan mega proyek rumah susun di beberapa kelurahan sebagai jawaban atas keraguan akan kelayakan dan keberlanjutan permukiman di daerah ini. Rekomendasi lain sebagai studi lanjutan adalah kajian kerentanan kesehatan permukiman di Kecamatan Tambora, Studi keberlanjutan permukiman di Kecamatan Tambora, serta Kajian resettlement masyarakat kecamatan tambora ke menjadi rumah susun.

Kata kunci: kerentanan fisik ruang kawasan, permukiman padat, bencana kebakaran, pemadam kebakaran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ledakan jumlah penduduk di DKI Jakarta telah terjadi. Pada skala megapolitan JABODETABEK, terdapat tidak kurang dari 13 juta orang beraktivitas di dalamnya sedangkan luasnya 664 kilometer persegi atau 0,04 persen dari total wilayah Indonesia, dihuni oleh sekitar 5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Menurut United National Council for Human Settlements pada Tahun 1980, Jakarta masih di urutan ke-21 kota terbesar dunia. Tahun 2000 naik ke urutan 14 dan tahun 2010 diperkirakan urutan ke-10 dengan jumlah penduduk saat itu 15,3 juta. Richard L Forstall dalam peringkat tahun 2001 menempatkan Jakarta di urutan ketiga kota terbesar di dunia, sementara demographia.com (2000) menempatkan di urutan keempat, sedangkan menurut World-Gazetteer di urutan keenam, dan mongabay.com di urutan ketujuh, dan citypopulation.de di urutan kesepuluh, (KOMPAS, 2005). Angka-angka tersebut diatas bukanlah merupakan suatu prestasi yang dapat dibanggakan manakala kita mengetahui bahwa para migran yang membanjiri Kota Jakarta sebagian besar diantaranya adalah penyebab potensi kemiskinan perkotaan. Para migran pada umumnya adalah warga pedesaan yang minim keterampilan. Minimnya keterampilan ini membuat masyarakat pada kelas ini sangat rawan dengan problematika pengangguran dan dampak liniernya, kemiskinan perkotaan. Tulus Tambunan dari LP3E Kadin Indonesia dalam makalah "*Urban Poverty, Informal Sector and Poverty Alleviation Policies in Indonesia*" (KOMPAS, 2005), juga menyebutkan sumber utama kemiskinan di perkotaan adalah kemiskinan dan kemunduran ekonomi di pedesaan. Karena ekonomi pedesaan didominasi oleh pertanian, maka sumber utama kemiskinan pedesaan adalah sektor pertanian yang dulu menjadi rumah bagi 70% penduduk Indonesia.

Pada lingkup ruang kota terdapat kecenderungan kaum miskin perkotaan dalam bermukim. Kecenderungan tersebut berangkat dari fenomena yang berbeda-beda akan tetapi pada akhirnya membentuk kesamaan-kesamaan dalam pola bermukim baik secara perilaku maupun bentukan fisik. Pada aspek perilaku kaum miskin perkotaan memiliki kecenderungan seperti perilaku kurang peduli pada lingkungan, melanggar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemukiman atau perumahan seperti pelanggaran IMB, kriminalitas terselubung seperti pencurian listrik. Pola-pola tersebut dapat dijumpai di beberapa kawasan-kawasan padat/ kumuh di Jakarta. Seiring berjalannya waktu lama-kelamaan masing-masing kawasan padat/ kumuh tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda.

Salah satu permasalahan yang identik dengan eksistensi permukiman kumuh tersebut adalah masalah kebakaran. Kasus-kasus kebakaran yang terjadi di lingkungan perkumuhan

berasal dari faktor kesalahan manusia (*human error*) yang beraktivitas di dalamnya (jakartafire.com). Dari fenomena ini terbentuk hipotesis awal bahwa, lingkungan permukiman kumuh merepresentasikan keadaan perekonomian menengah ke bawah yang berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian akan keselamatan dalam bermukim.

Sejalan dengan hipotesis awal tersebut, penelitian ini mengangkat lokasi kawasan Kecamatan Tambora yang termasuk dalam wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Pada dasarnya tidak ada justifikasi secara legal yang mengategorikan sebuah wilayah dengan kategori kumuh. Namun kategori kumuh tersebut merupakan sebuah *image* yang terbangun dari data-data dari lapangan. Image kumuh dapat ditinjau dari dua hal yakni jumlah tingkat kepadatan penduduk dan bentukan fisik permukimannya. Sebagai tahap awal identifikasi, Kecamatan Tambora merupakan sebuah kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di propinsi DKI Jakarta. Bahkan disebutkan bahwa Kecamatan Tambora adalah wilayah terpadat se-Asia (Sinar Harapan, 2003). Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar (541,43 Ha), kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 266.250 jiwa dengan demikian maka kepadatan rata-rata penduduknya adalah 491 jiwa /Ha (sangat padat, >150 jiwa/Ha). Pada survey tahun 2000, 2002, dan 2003, jumlah penduduk miskinnya menempati urutan ke-dua se-DKI Jakarta setelah Kecamatan Pedemangan Jakarta Utara.

. Dalam definisinya, Ridho (2001: 15) membagi dua jenis pengertian mengenai kapung kumuh yang dipandang dari aspek legalitas. "*permukiman (kampung) kumuh atau slums merupakan daerah pemukiman padat dalam kota, yang sebagian penduduknya dihadapkan pada masalah-masalah sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Namun dalam kepemilikan dan hak atas tanah, semuanya adalah sah*". Berdasarkan data-data yang didapat beserta observasi lapangan, kawasan Kecamatan Tambora ini dapat digolongkan kedalam jenis Pemukiman Kumuh (*slums*).

Bentuk fisik permukiman kumuh tersebut tidak terlepas dari faktor kemiskinan perkotaan. Bentuk fisik permukiman yang tidak didasari dengan pola dan proses perencanaan yang sesuai aturan tentunya akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Secara historis, kawasan Kecamatan Tambora merupakan lingkungan permukiman yang tumbuh secara alami (sebuah kampung yang tumbuh menjadi besar secara alami tanpa menjalani proses perencanaan kota). Seiring berjalannya waktu, kawasan Kecamatan Tambora tumbuh semakin tidak teratur. Hal ini dapat ditinjau dari tingkat kerapatan antar bangunan yang sangat tinggi, penggunaan lahan yang tidak teratur, lebar jalan yang semakin menyempit, dan sanitasi yang buruk. Hal ini diperparah lagi dengan perilaku anti-urban yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana kebakaran seperti pencurian listrik, industri konveksi yang berlangsung 24jam/hari, penggunaan

kompor minyak yang teledor, hingga penggunaan lilin api untuk penerangan di ruang-ruang yang mudah terbakar.

Dari fakta empiris menegaskan bahwa isu permasalahan di Kecamatan Tambora adalah bahwa kawasan Kecamatan Tambora merupakan kawasan yang memiliki rekam jejak rawan akan bencana kebakaran. Pada dasarnya angka kebakaran pada tiap kecamatan di Jakarta Barat relatif tinggi. Akan tetapi, berdasarkan sumber data Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Kecamatan Tambora tidak pernah menempati urutan pertama dalam frekuensi kebakaran dalam lima tahun terakhir. Terdapat keunikan ketika didapati bahwa tidak terdapat “juara bertahan” pada angka itu. Hal ini berarti tidak terdapat satu kecamatanpun yang menjadi “langganan” pada urutan pertama. Sementara Kecamatan Tambora selalu berada dalam urutan ke-dua dan ke-tiga (Dinas Kebakaran Jakarta Barat, 2006). Data terkecil pada kurun waktu lima tahun terakhir menyebutkan bahwa pada tahun 2006, 106 kepala keluarga (KK) atau 460 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari 55.542 KK, 4.609KK merupakan penduduk golongan miskin. Sedangkan bencana kebakaran yang terjadi kerap kali memakan korban penduduk golongan miskin yang pada umumnya bertempat tinggal di rumah-rumah yang masih menggunakan bahan bangunan semi-permanen seperti dinding rumah yang terbuat dari kayu.

Karakteristik kebakaran di Kecamatan Tambora merupakan sebuah daya tarik tersendiri manakala munculnya fenomena yang terbentuk dari data-data tersebut diatas. Dari fenomena tersebut muncul ide tentang bagaimana mengkaji kondisi eksisting dari kawasan Kecamatan Tambora.

1.2 Perumusan Masalah

Fenomena pertama yang menonjol dari lokasi studi adalah bahwa Kecamatan Tambora yang terkenal kerap terjadi kebakaran ternyata bukanlah kecamatan dengan frekwensi tertinggi yang mengalami bencana kebakaran, melainkan selalu menempati urutan ke-dua atau ke-tiga setiap tahunnya. Sedangkan fenomena yang ke-dua adalah bahwa bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Tambora kerap kali mengakibatkan korban jiwa, kehilangan harta benda serta kehilangan tempat tinggal lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya (dapat dilihat pada BAB III, pada tabel 3.5, 3.6, dan 3.7).

Fenomena pertama mengindikasikan bahwa ada permasalahan mendasar yang melekat pada aspek fisik ruang kawasan maupun dari perilaku dari masyarakat yang bermukim di dalamnya. Permasalahan fisik ruang kawasan dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya bagaimana sistem intalasi jaringan listrik per satuan bangunan, aktivitas apa yang berlangsung dalam bangunan, bahan bangunan apa yang digunakan pada bangunan tersebut, hingga pada bagaimana tingkat kepadatan bangunan pada lokasi tersebut.